

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang

Amanda Ardelia Putri

Universitas Bina Sarana Informatika

Sonny Fransisco Siboro

Universitas Bina Sarana Informatika

Elsa Safitri

Universitas Bina Sarana Informatika

Nabilla Aulia

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl.Margonda No.8,Pondok Cina,Kecamatan Beji,Kota Depok,Jawa Barat 16424

Korespondensi Penulis : [amandaardel2 @email.com](mailto:amandaardel2@email.com)

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between the percentage of Original Regional Income (PAD) and the percentage of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Jombang Regency. The data analysis method used is a qualitative descriptive method that collects secondary data from official sources, such as local government financial reports. The research findings show that there has been a fluctuation in the ratio of PAD to APBD in Jombang Regency within the specified period. One of the implications of this research is the importance of increasing Original Regional Income as a source of original regional income for local governments in managing the APBD.

Keywords: *Regional Original Income, Regional Revenue and Expenditure Budget, Jombang Regency, Financial Ratios*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jombang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data sekunder dari sumber resmi, seperti laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi rasio PAD terhadap APBD di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu yang ditentukan. Salah satu implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah dalam mengelola APBD.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Jombang, Rasio Keuangan*

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang adil dan progresif. Misalnya Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai 13 rencana pengeluaran dan penerimaan negara

Received April 22, 2024; Accepted Mei 28, 2024; Published Juli 31, 2024

* Amanda Ardelia Putri, [amandaardel2 @email.com](mailto:amandaardel2@email.com)

untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemerintah adalah suatu jenis organisasi yang diberi wewenang untuk mengubah dan mengawasi kepentingan bangsa dan rakyatnya. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan meningkatkan pelayanan tersebut di masa yang akan datang, peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk. Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, partisipasi angkatan kerja, kontribusi pegawai, dan lain-lain. Untuk mencapai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus berkonsentrasi pada sektor-sektor strategis dan potensial di daerah, termasuk sektor keuangan, infrastruktur, dan sektor riil. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap hasil-hasil proyek pembangunan harus dilakukan dengan menggunakan data statistik yang berkualitas tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui kinerja dan keuangan pemerintah daerah setiap dua tahun sekali, sehingga pemerintah dapat bersabar untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. (Yun Fitriano, Ahmad Soleh, 2020).

Pendapatan asli daerah (PAD) yang harus diberi perhatian khusus dari pemerintah sehingga menandakan kondisi asli keuangan daerah, dapat menjadi tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

Struktur PAD yang kuat juga memiliki dampak pembiayaan yang kuat. Mengenai dana alokasi umum dan khusus serta bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat, hanya berfungsi sebagai sarana pendukung pembangunan daerah dan operasional pemerintahan. Jika PAD di daerah tersebut tinggi sementara DAU dan DAK rendah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa dampak daerah tersebut terhadap pemerintah pusat sangat kecil. Dengan tingkat ketergantungan yang rendah, daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Sebagai indikator, pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Peningkatan PAD suatu daerah dapat membantu daerah tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa

memanfaatkan sumber daya dari pemerintah pusat. Rasio pertumbuhannya berpotensi untuk menggambarkan dasar kekuatan pemerintah daerah dengan meningkatkan tingkat keberhasilan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio kemampuan, dan trend dilakukan dalam rangka mengurangi kemandirian keuangan daerah yang menjadi sorotan dalam APBD. (Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni, 2021).

Menurut Djaenuri (2012:88) dalam bukunya Hubungan Keuangan Pusat Daerah bahwa: “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang mana bersumber dari sumber yang berada di wilayahnya serta dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku”.(Cahya Aulia Charisma, 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama dalam APBD. Rasio PAD terhadap APBD merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi distribusi mata uang daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pekerjaan umum dan inisiatif pembangunan. PAD merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan keuangan suatu daerah karena dapat mengurangi potensi ekonomi dan efisiensi peredaran mata uang daerah.

Di Kabupaten Jombang, PAD memiliki keunggulan strategis dalam menyoroti keberhasilan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Analisis kekayaan relatif negara (PAD) dalam kaitannya dengan PDB dan kekayaan nasional (APBD) adalah alat yang berguna untuk menilai kesehatan pemerintah negara. Statistik ini menunjukkan beberapa kontribusi signifikan dari PAD terhadap anggaran daerah secara keseluruhan dan mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rasio ini menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah. Dalam konteks Kabupaten Jombang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terhadap rasio PDRB per kapita domestik (PAD) terhadap PDRB per kapita dan PDRB per kapita (APBD). Diharapkan melalui analisis yang komprehensif, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan rasio tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja di daerah.

Dengan demikian, diharapkan hasil studi ini akan dapat membantu pemerintah daerah secara signifikan dalam mengatasi masalah keuangan yang difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan efisiensi transfer uang daerah.

KAJIAN TEORITIS

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam analisis teoritis mengenai analisis rasio pendapatan asli daerah untuk lebih memahami dan mengerti fenomena ini. Berikut adalah beberapa teori yang berkaitan dengan konteks ini:

1. Teori Pendapatan Ketergantungan

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap investasi asing langsung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah, kondisi keuangan, dan tingkat diversifikasi portofolio investasi. Suatu daerah akan rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan kebijakan karena tingginya ketergantungan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi lokal mempengaruhi rata-rata pendapatan daerah. Sejumlah faktor, termasuk investasi, inovasi, dan infrastruktur, dapat mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan aspiratif yang stabil.

3. Pajak dan Kepatuhan Pajak

Teori ini menyoroti perlunya sistem perpajakan yang efisien dan efektif dalam menghasilkan kekayaan asli daerah. Faktor-faktor seperti tarif pajak, kebijakan insentif, dan tingkat perputaran pajak dapat mempengaruhi jumlah dan stabilitas penerimaan pajak di suatu daerah.

4. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori ini berfokus pada bagaimana pembangunan ekonomi daerah dapat mempengaruhi pendapatan domestik. Faktor-faktor seperti investasi sumber daya manusia, pengembangan industri lokal, dan pemasaran kooperatif dapat meningkatkan potensi pendapatan luar negeri di wilayah tersebut.

5. Teori Administrasi Keuangan Daerah

Teori ini membahas metode yang digunakan oleh administrator keuangan daerah untuk mengalokasikan pendapatan asli daerah dengan cara yang efisien dan transparan. Faktor-

faktor seperti penggunaan leverage, pemantauan pinjaman, dan penilaian pendapatan valuta asing dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori, dimungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap rasio asli daerah, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan asli daerah dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan resmi pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Data tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode tertentu. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara kedua variabel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan dasar yang kokoh untuk studi lebih lanjut mengenai korelasi antara PAD dan APBD di Kabupaten Jombang, sambil menekankan urgensi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pembangunan lokal.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau wilayah otonom dari sub-wilayah di dalam wilayah tersebut. Ini mencakup berbagai jenis pembayaran, seperti jasa biro perjalanan (biro perjalanan untuk kendaraan bermotor, biro perjalanan untuk hotel, biro perjalanan untuk restoran, dll.), hasil usaha biro perjalanan (BUMD), hasil penjualan biro perjalanan, dan penerimaan lain yang sah yang sesuai dengan peraturan perjalanan.

Setiap penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dimasukkan dalam APBD. Peruntukan dan transfer daerah didasarkan pada pelaksanaan desentralisasi secara bertahap. Sebaliknya, penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan tugas pembantuan atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD adalah dasar pertukaran mata uang daerah dalam satu tahun anggaran. APBD mengacu pada rencana pelaksanaan semua inisiatif pengentasan kemiskinan daerah dan nasional dalam kerangka desentralisasi selama tahun anggaran berjalan. Setiap negara di dunia berusaha keras untuk memenuhi target yang telah

ditetapkan dalam APBD. Demikian juga, semua penggunaan lahan dan pengembangan tutupan lahan yang merestrukturisasi lahan dalam rangka desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan pedoman yang telah ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar untuk pertukaran mata uang daerah, maka APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan pertukaran mata uang daerah, pemeriksaan, dan wawasan. (WANCE, 2019)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. APBD terdiri dari dua bagian utama: pendapatan dan tabungan. Pemerintah daerah selama periode tertentu menciptakan sumber pendapatan yang dituju, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Fungsi utama APBD adalah mengatur pengeluaran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa proses APBD dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan, banyak langkah yang terlibat, termasuk penilaian, evaluasi, analisis, dan penganggaran. Sebaliknya, untuk mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memodifikasi berbagai program, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri, seperti pendapatan dari pertanian, pendapatan dari pembangunan kembali, pendapatan dari operasi militer, dan sumber-sumber lain yang relevan. Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pertukaran tabel yang memberikan informasi tentang jumlah klaim dan uang muka yang akan ditangani oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Hubungan Antara PAD dan APBD

Hubungan antara PAD dan APBD merupakan faktor penting dalam pengelolaan mata uang daerah. Salah satu komponen utama dari APBD adalah PAD, yang secara signifikan dapat mengurangi alokasi anggaran untuk berbagai program dan inisiatif pembangunan daerah. Karena PAD merupakan komponen utama APBD, maka terdapat hubungan yang kuat antara PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Sumber Pendapatan

Salah satu sumber utama yang digunakan untuk memodifikasi APBD adalah PAD. Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber yang ada di daerah, antara lain: retribusi, hasil perusahaan milik daerah, pajak daerah, dan lain-lain.

2. Penyusunan APBD

Ketika pemerintah daerah mengimplementasikan APBD, mereka menurunkan estimasi jumlah pendapatan yang mungkin diperoleh melalui PAD. Prosedur ini terdiri dari proyek pendapatan yang akan dihasilkan dari beberapa sumber PAD dalam jangka waktu tertentu.

3. Perencanaan Pengeluaran

Penyusunan APBD memiliki manfaat tambahan untuk meningkatkan pendapatan yang tersedia dari PAD untuk memfasilitasi pengeluaran. Pemerintah daerah akan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kekurangan penerimaan PAD.

4. Ketergantungan Keuangan

Dampak APBD terhadap PAD berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada potensi ekonomi, stabilitas keuangan, dan faktor lainnya. Beberapa daerah mungkin memiliki PAD yang sangat besar yang dapat mengurangi sebagian besar masalah mereka, sementara daerah lain mungkin lebih rentan terhadap Dana Perimbangan atau sumber pendapatan lainnya.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Selama pelaksanaan APBD, mengawasi dan menilai realisasi PAD sangat penting. Penyesuaian dapat dilakukan dalam APBD perubahan atau dalam kebijakan lain jika terjadi perbedaan. Pemerintah daerah harus mengatur agar target pendapatan dari PAD tercapai sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Oleh karena itu, PAD dan APBD memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang keuangan daerah, dimana PAD merupakan sarana utama untuk memperoleh dana untuk mendukung APBD, sedangkan APBD merupakan instrumen utama untuk mengkoordinasikan, mengalokasikan, dan menggunakan dana-dana tersebut untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian Terdahulu tentang Pengaruh PAD terhadap APBD

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara PAD dan APBD di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PAD dan APBD, sementara faktor-faktor lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan partisipasi masyarakat juga turut mempengaruhi melemahnya hubungan tersebut. Penelitian mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah banyak dilakukan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang keuangan publik dan ekonomi daerah. Berikut ini adalah beberapa poin umum yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut:

1. Pengaruh Positif

Mayoritas penelitian menemukan adanya korelasi positif antara kekuatan PAD dan APBD. Akibatnya, jika PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah meningkat, maka APBD pasti akan meningkat.

2. Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Studi ini juga menyoroiti hubungan antara tingkat PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan PAD yang besar cenderung lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan program dan proyek.

3. Pengaruh Peraturan Pajak dan Retribusi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pajak dan retribusi memiliki dampak yang signifikan terhadap kekuatan relatif PAD dan APBD. Peningkatan PAD dan APBD dapat dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi.

4. Potensi ekonomi daerah

Termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga telah diperiksa dalam kaitannya dengan PAD dan APBD. Peningkatan potensi ekonomi yang signifikan dapat meningkatkan PDRB dan pada gilirannya meningkatkan APBD.

5. Pengaruh Variabel Kontrol Lain

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kontrol, seperti tingkat inflasi, pendapatan per kapita, dan karakteristik politik daerah, yang semuanya dapat mempengaruhi hubungan antara PAD dan APBD.

Secara umum, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk membentuk keputusan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dengan memahami hubungan dinamis antara PAD dan APBD serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Konteks Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang, sebagai salah satu dari tiga daerah di Asia Tengah, memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan politik yang unik. Penelitian mengenai dampak PAD terhadap APBD di Kabupaten Jombang penting dilakukan untuk memahami dinamika pertukaran mata uang daerah di tingkat lokal. Kabupaten Jombang, sebuah provinsi yang terletak di wilayah barat Indonesia, memiliki konteks yang unik dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai salah satu

daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Jawa Timur, Jombang memiliki karakteristik dan dinamika tertentu yang berdampak negatif pada PAD dan APBD-nya.

1. Potensi Ekonomi

Jombang memiliki berbagai sektor ekonomi yang potensial, termasuk sektor pertambangan, industri, transportasi, dan perdagangan besar. Segmen tanaman pangan dan hortikultura, terhadap sektor pertanian melalui pajak pertanian dan retribusi pasar, merupakan salah satu kontributor utama PAD.

2. Industri dan Perdagangan

Selain sektor minyak bumi, industri dan perdagangan memainkan peran penting dalam kontribusi PAD. Jombang memiliki sektor industri yang berkembang pesat, terutama di bidang manufaktur, pengolahan makanan, dan pertanian. Kegiatan perdagangan yang luas, baik di pasar tradisional maupun pasar baru, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD melalui retribusi pasar dan retribusi sejenisnya.

3. Potensi Retribusi

Kabupaten Jombang juga memiliki potensi retribusi yang cukup besar, sebagian besar berasal dari sektor publik dan sektor pariwisata. Destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah di Jombang merupakan sumber pendapatan yang potensial melalui retribusi pariwisata.

4. Industri dan Perdagangan

Selain sektor minyak bumi, industri dan perdagangan memainkan peran penting dalam kontribusi PAD. Jombang memiliki sektor industri yang berkembang pesat, terutama di bidang manufaktur, pengolahan makanan, dan pertanian. Kegiatan perdagangan yang luas, baik di pasar tradisional maupun pasar baru, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD melalui retribusi pasar dan retribusi sejenisnya.

5. Potensi Retribusi

Kabupaten Jombang juga memiliki potensi retribusi yang cukup besar, sebagian besar berasal dari sektor publik dan sektor pariwisata. Destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah di Jombang merupakan sumber pendapatan yang potensial melalui retribusi pariwisata.

Oleh karena itu, konteks Kabupaten Jombang dalam PAD dan APBD menunjukkan bahwa banyak faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi nilai sumber daya daerah dan penggunaannya untuk pembangunan dan alokasi sumber daya. Upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PAD dan APBD secara efektif sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa penyebaran PAD memiliki peran penting dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Jombang. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pertukaran mata uang yang lebih efektif dan komprehensif. Menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara PAD dan APBD di Provinsi Jombang. Faktor-faktor seperti jenis PAD, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berkontribusi terhadap hubungan ini. Penggunaan PAD yang efektif dapat meningkatkan alokasi APBD untuk pembangunan daerah. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas pinjaman mata uang daerah. Kemandirian keuangan daerah dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu kesimpulan dari penelitian ini. Pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia Tuhan kami dapat menyelesaikan proyek saya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. tugas ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh nilai akhir ujian semester.

DAFTAR REFERENSI

- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran Dprd Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245.
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154-163.
- Fikki, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah. *J-Iskan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 3(2), 140-160.
- Fitriano, Y., Soleh, A., & Khairullah, R. (2020). Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 3(1).
- Hamid, A., & Yusuf, Z. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Emt Kita*, 7(3), 676-683.

- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(2), 18-34.
- Safitri, A. N. (2019). Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Trenggalek (Doctoral Dissertation, Uin Walisongo).
- Sahrudin, S. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan Ips*, 10(2), 150-156.
- Sahrudin, S., & Syahid, S. (2023). Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb) Tahun 2019-2023. *Sosio E-Kons*, 15(3).
- Saputra, R. (2024). *Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang* (Doctoral Dissertation, 021008-Universitas Tridianti).
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas* (Vol. 4, No. 1, Pp. 408-425).
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 56-72.
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 5(1).
- Wardana, M. D., Mahsuni, A. W., & Afifudin, A. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat 2011-2018. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(02).
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15-28.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 3(2), 465-472.